



Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin

Collaborative Governance Model in the Implementation of National Strategic Projects in Musi Banyuasin Regency

Aka Kurniawan*, Sriati & Andries Lionardo

Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas model tata kelola kolaboratif dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Musi Banyuasin, Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembebasan lahan, dampak sosial-ekonomi, serta potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Melalui pendekatan tata kelola kolaboratif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan proyek strategis agar lebih efisien dan tepat waktu. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Musi Banyuasin, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terkait implementasi proyek PSN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Kesimpulannya, model kolaboratif ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan proyek strategis di Indonesia.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Proyek Strategis Nasional, Pengelolaan Infrastruktur.

Abstract

This study examines the collaborative governance model in the implementation of National Strategic Projects (PSN) in Musi Banyuasin Regency, Indonesia. The primary focus is to identify the challenges faced in infrastructure development, such as land acquisition, socio-economic impacts, and the potential for abuse of power and corruption. The research utilizes a qualitative approach with case studies, gathering data through in-depth interviews and field observations from key informants involved in the PSN projects. The findings suggest that collaborative governance, involving various stakeholders, can optimize project management and accelerate the achievement of development goals. The study concludes that this model provides an effective solution for overcoming challenges in strategic project management, particularly in ensuring transparency, accountability, and efficient execution of projects. Furthermore, the research proposes an ideal collaborative governance model for future PSN projects, emphasizing the role of law enforcement agencies in ensuring legal compliance and preventing corruption.

Keywords: Collaborative Governance, National Strategic Projects, Infrastructure Management.

How to Cite: Kurniawan, A., Sriati & Lionardo, A. (2025). Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2) 2024: 105-115



PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama dalam proyek-proyek strategis, merupakan salah satu fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan yang merata dan mencakup berbagai sektor penting, seperti transportasi, energi, dan teknologi (Ervianto, 2017; Putri, 2024). Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan aksesibilitas, serta memperkuat ekonomi regional dan nasional. Salah satu bentuk infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian adalah pembangunan jalan tol, yang memungkinkan mobilitas barang dan orang lebih efisien (Apriyadi & Triwibawanto, 2025; Nobel & Larasati, 2017).

Namun, seiring dengan percepatan pembangunan, tantangan terkait dengan pengelolaan proyek-proyek strategis semakin kompleks. Permasalahan seperti pembebasan lahan, penanganan dampak sosial-ekonomi, serta potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pelaksanaan proyek sering kali menjadi hambatan besar yang memperlambat kemajuan (Adawiyah & Taupiqqurrahman, 2023; Santosa et al., 2022). Hal ini menyebabkan banyak proyek tidak terlaksana sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam pengelolaan proyek strategis, yang melibatkan berbagai pihak terkait, untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi proyek tersebut (Febriansah et al., 2024; Wahyu, 2018).

Kolaborasi antar aktor pemerintahan dan non-pemerintahan menjadi solusi yang banyak diadopsi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis. Konsep collaborative governance atau tata kelola kolaboratif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan proyek dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Model ini mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari berbagai sektor untuk mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi selama implementasi proyek (Jubaedah, 2011; Mukti & Efendi, 2020; Ramadhani et al., 2025).

Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah suboptimalnya pelaksanaan proyek strategis nasional, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun proyek PSN, seperti pembangunan jalan tol, telah diinisiasi, proses pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan, termasuk dalam hal pembebasan lahan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta potensi terjadinya praktik korupsi. Salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran proyek adalah kurangnya pengawasan dan pendampingan hukum yang efektif dari lembaga-lembaga negara, terutama Kejaksaan Negeri (Faniyah & Tanjung, 2022; Haja, 2020; Mauludin & Indrapradja, 2025).

Dalam konteks ini, peran Kejaksaan Negeri sebagai pengawal hukum dalam proyek PSN menjadi sangat penting. Kejaksaan memiliki tugas untuk memberikan pendampingan hukum, mencegah praktik korupsi, serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas pendampingan ini masih diragukan, mengingat beberapa proyek masih menghadapi keterlambatan dan penyimpangan yang signifikan (Kelik Wardiono et al., 2020; Martanti, 2022; SUSANTO et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi model kolaboratif dalam implementasi PSN di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan fokus pada peran pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji topik terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Salah satunya adalah penelitian oleh Emerson et al. (2012) yang mengembangkan An Integrative Framework for Collaborative Governance. Penelitian ini mengemukakan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan antar pihak yang terlibat, struktur koordinasi yang efektif, serta

transparansi dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini memberikan landasan teori yang kuat untuk penelitian tentang tata kelola kolaboratif dalam konteks proyek PSN di Indonesia.

Penelitian lain yang relevan adalah Kline & Moretti (2014) dalam studi mereka yang berjudul *People, Places, and Public Policy: Some Simple Welfare Economics of Local Economic Development Programs*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis tempat, seperti pembangunan infrastruktur di daerah tertentu, memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Hal ini relevan dengan penelitian ini karena pembangunan jalan tol di Kabupaten Musi Banyuasin juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur.

Selain itu, Kim (2010) dalam penelitiannya *Collaborative Governance in South Korea: Citizen Participation in Policy Making and Welfare Service Provision* menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam kebijakan publik, yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Meskipun konteks yang dibahas berbeda, konsep partisipasi dan kolaborasi dalam penelitian ini dapat diterapkan pada proyek PSN di Indonesia, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus dilibatkan dalam setiap tahap pelaksanaan proyek untuk memastikan keberhasilan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam pembangunan PSN, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendampingan Kejaksaan Negeri dalam proyek-proyek strategis tersebut. Penelitian ini juga berupaya untuk merumuskan model ideal tata kelola kolaboratif yang dapat diterapkan dalam implementasi PSN di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Musi Banyuasin. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami proses, dinamika, serta kontribusi dari berbagai aktor yang terlibat dalam proyek PSN, terutama dalam aspek pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih holistik mengenai implementasi kebijakan dan efektivitas kolaborasi antar sektor dalam proyek tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PSN di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk pejabat pemerintah daerah, staf Kejaksaan Negeri, serta masyarakat yang terpengaruh langsung oleh pembangunan proyek. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan perspektif yang beragam tentang tantangan, hambatan, serta keberhasilan dalam penerapan tata kelola kolaboratif. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk memantau secara langsung dinamika interaksi antar aktor yang terlibat dalam proyek, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan pemerintah daerah, serta literatur terkait yang membahas proyek PSN dan tata kelola kolaboratif. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan mengenai kebijakan, regulasi, serta laporan kemajuan proyek yang relevan dengan penelitian. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola interaksi, peran masing-masing aktor, serta keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan tata kelola kolaboratif. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana tema-tema utama

yang berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dan efektivitas pendampingan hukum dikategorikan dan diinterpretasikan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Salah satu proyek PSN yang menjadi fokus di Kabupaten Musi Banyuasin adalah pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi, bagian dari proyek tol Trans Sumatera yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar kota besar di Sumatera. Proyek ini memiliki peran penting dalam mempercepat distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong perekonomian daerah. Namun, meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan yang harus diselesaikan melalui pengelolaan yang lebih efektif dan kolaboratif antar berbagai pemangku kepentingan yang terlibat.

Salah satu pendekatan yang diadopsi dalam pelaksanaan proyek PSN adalah penerapan collaborative governance, yang mengedepankan kerja sama antara berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif merupakan konsep yang melibatkan berbagai aktor dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks PSN di Kabupaten Musi Banyuasin, kolaborasi antar aktor ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul, seperti pembebasan lahan, masalah sosial, dan potensi penyimpangan hukum, yang sering kali menjadi hambatan dalam kelancaran pembangunan infrastruktur.

Menurut Ansell dan Gash (2007), ada lima elemen utama dalam collaborative governance, yaitu (1) starting conditions (kondisi awal), (2) institutional design (desain kelembagaan), (3) facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif), (4) collaborative process (proses kolaboratif), dan (5) outcomes (hasil). Setiap elemen ini memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam proyek PSN. Di Kabupaten Musi Banyuasin, penerapan konsep ini sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek PSN yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan kompleksitas pengelolaan yang harus diatasi.

1. Kondisi Awal (Starting Conditions)

Kondisi awal yang dihadapi dalam proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di wilayah tersebut, yang memengaruhi akses masyarakat terhadap infrastruktur yang memadai. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 12,88% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan ekonomi yang signifikan antara pusat dan daerah. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi tantangan infrastruktur yang buruk, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti di Kecamatan Batang Hari Leko. Akses yang terbatas terhadap fasilitas dasar, seperti jalan dan air bersih, membuat kebutuhan pembangunan infrastruktur semakin mendesak.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk mendukung percepatan proyek PSN, khususnya pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi. Dalam hal ini, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan penting dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi jalannya proyek. KPPIP memiliki peran dalam memonitor dan mempercepat penyediaan infrastruktur yang bersifat prioritas, sementara BPKP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan implementasi proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa kondisi awal proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin harus didukung dengan kebijakan yang matang dan pengawasan yang ketat.

2. Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Desain kelembagaan dalam pelaksanaan proyek PSN mencakup struktur dan peran setiap aktor yang terlibat, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bersama dengan BBPJK (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional), bertanggung jawab dalam proses pembangunan dan pengawasan proyek jalan tol. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran vital dalam mendampingi proyek ini dengan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan. Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas hukum, tetapi juga memberikan pertimbangan hukum dalam hal pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.

Desain kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak ini sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang efektif antara aktor-aktor yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda. Kejaksaan Negeri, misalnya, tidak hanya memberikan pendampingan dalam aspek hukum tetapi juga memastikan bahwa proyek berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dalam hal ini, desain kelembagaan yang memfasilitasi komunikasi yang terbuka antara semua pihak akan mempercepat proses penyelesaian masalah dan menghindari penyalahgunaan anggaran.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)

Dalam konteks collaborative governance, kepemimpinan fasilitatif berperan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek PSN dapat bekerja sama secara harmonis dan produktif. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan dukungan dari Kejaksaan Negeri, berperan sebagai pemimpin fasilitatif dalam proses kolaborasi ini. Kepemimpinan fasilitatif memerlukan kemampuan untuk memediasi antara berbagai kepentingan yang ada, serta memastikan bahwa komunikasi antara semua aktor berjalan lancar. Di Kabupaten Musi Banyuasin, proses kolaboratif ini juga melibatkan masyarakat, yang sering kali merasa terpinggirkan dalam proyek-proyek pembangunan besar. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Kepemimpinan fasilitatif juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam proses pembangunan, seperti penundaan dalam pembebasan lahan dan ketegangan sosial yang sering kali muncul akibat proyek-proyek besar. Pemimpin yang dapat memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat akan mampu mengidentifikasi solusi yang lebih cepat dan efektif, serta mengurangi potensi konflik yang dapat menghambat kelancaran proyek.

4. Proses Kolaboratif (Collaborative Process)

Proses kolaboratif dalam proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Tahap perencanaan yang melibatkan berbagai aktor kunci, seperti pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, dan masyarakat, merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan keberhasilan proyek. Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak yang terlibat.

Selain itu, proses kolaboratif ini juga mencakup koordinasi yang erat antara berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proyek. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan BBPJK untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Kejaksaan Negeri, melalui pendampingan hukum, berperan dalam mengawasi pelaksanaan proyek agar tidak terjadi pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Dengan adanya proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak ini, diharapkan proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

5. Outcomes (Hasil)

Keberhasilan dari penerapan collaborative governance dalam proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan aksesibilitas, pengurangan kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu hasil yang diharapkan dari pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi adalah terhubungnya berbagai daerah di Sumatera, yang akan memperlancar distribusi barang dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi

masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan adanya akses yang lebih baik terhadap fasilitas dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun, evaluasi hasil proyek ini juga harus mencakup aspek sosial, yaitu sejauh mana masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari pembangunan ini. Apakah proyek ini dapat memenuhi harapan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial? Oleh karena itu, pengukuran hasil tidak hanya dilihat dari aspek fisik dan teknis, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial.

Efektivitas Pendampingan Kejaksaan Negeri dalam Implementasi PSN di Kabupaten Musi Banyuasin

Pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin memegang peran strategis dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah ini. Kejaksaan, khususnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), memiliki tugas penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam setiap tahap pembangunan proyek. Pendampingan ini bukan hanya terbatas pada pemberian pertimbangan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pengawasan, dan penyelesaian masalah hukum yang muncul selama pelaksanaan proyek. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri berfungsi sebagai pengawal hukum yang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan PSN mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta menghindari potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

1. Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri dalam Proyek PSN

Pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin berfokus pada beberapa aspek penting, seperti pembebasan lahan, pengelolaan anggaran, dan penyelesaian sengketa yang mungkin muncul selama pembangunan proyek. Salah satu peran utama Kejaksaan adalah memastikan bahwa setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal pembebasan lahan, misalnya, Kejaksaan Negeri memberikan konsultasi hukum untuk menghindari potensi sengketa atau masalah hukum terkait dengan pemilikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Pada tahap pelaksanaan proyek, Kejaksaan Negeri juga memiliki peran dalam mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana yang digunakan untuk proyek PSN digunakan dengan tepat dan efisien. Hal ini sangat penting, mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol. Kejaksaan juga berperan dalam pengawasan terhadap kontraktor dan sub-kontraktor yang terlibat dalam proyek, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan tidak melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, Kejaksaan Negeri berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, seperti antara pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak atau antara pihak pemerintah dengan kontraktor. Kejaksaan Negeri juga berperan dalam mengurangi potensi korupsi yang dapat terjadi dalam proyek-proyek besar dengan memberikan pengawasan hukum yang ketat dan mendorong akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

2. Dampak Pendampingan Hukum terhadap Keberhasilan PSN

Efektivitas pendampingan Kejaksaan Negeri dapat dilihat dari sejauh mana mereka mampu mencegah terjadinya masalah hukum yang menghambat kelancaran proyek. Dalam konteks proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin, salah satu dampak positif dari pendampingan hukum adalah mempercepat proses pembebasan lahan yang seringkali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek infrastruktur besar. Kejaksaan Negeri berperan dalam memastikan bahwa pembebasan lahan dilakukan dengan cara yang sah dan tidak menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan. Dengan pendampingan hukum ini, proyek PSN dapat berjalan lebih cepat karena hambatan administratif yang terkait dengan pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan lebih efisien.

Selain itu, pendampingan hukum juga berperan dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri membantu memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk proyek PSN tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran ini mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun.

Efektivitas pendampingan hukum juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap pengurangan potensi korupsi dalam proyek PSN. Kejaksaan Negeri, dengan kapasitasnya sebagai lembaga pengawasan hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dalam proyek-proyek besar, terutama yang melibatkan anggaran negara, potensi penyimpangan sangat besar, sehingga pengawasan hukum yang ketat dari Kejaksaan Negeri dapat membantu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan proyek.

3. Evaluasi Efektivitas Pendampingan Kejaksaan Negeri

Evaluasi efektivitas pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilakukan melalui beberapa indikator, seperti kelancaran pelaksanaan proyek, pengurangan jumlah sengketa hukum, serta keberhasilan penyelesaian masalah hukum yang timbul selama proyek berjalan. Salah satu indikator utama dari efektivitas pendampingan ini adalah seberapa cepat dan efisien proses pembebasan lahan dapat dilakukan tanpa menimbulkan masalah hukum yang berkepanjangan. Kejaksaan Negeri yang mampu menyelesaikan sengketa atau masalah hukum lainnya dengan cepat dapat mempercepat pelaksanaan proyek, sehingga proyek PSN dapat diselesaikan tepat waktu.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran proyek juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pendampingan hukum. Kejaksaan Negeri yang mampu memastikan bahwa anggaran proyek digunakan dengan tepat dan transparan akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Keberhasilan dalam mengurangi penyimpangan anggaran akan berdampak positif terhadap keberlanjutan proyek dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan PSN.

Namun, meskipun pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri menunjukkan dampak positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan efektivitas pendampingan ini. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri, agar lebih mampu dalam mengawasi proyek yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Pelatihan dan peningkatan kompetensi Jaksa Pengacara Negara juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pendampingan hukum yang lebih baik dan lebih efisien. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara Kejaksaan Negeri dengan lembaga pengawas lainnya, seperti BPKP dan KPPIP, juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa proyek PSN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Pendampingan Hukum sebagai Solusi Strategis dalam Pengelolaan PSN
Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya berfungsi sebagai pengawas legalitas proyek, tetapi juga sebagai solusi strategis dalam pengelolaan PSN secara lebih efektif. Dengan adanya pendampingan hukum yang intensif, proyek PSN dapat meminimalkan risiko hukum yang dapat menghambat kelancaran proyek dan mempercepat penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul. Kejaksaan Negeri yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses hukum dapat membantu menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi kelancaran proyek dan memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Pendampingan hukum juga memiliki dampak positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proyek PSN. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta penyelesaian masalah hukum, masyarakat akan lebih yakin bahwa proyek ini dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan kepentingan publik. Kepercayaan masyarakat ini penting untuk menjaga dukungan terhadap proyek dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

Dengan demikian, pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan PSN di daerah ini. Keberhasilan pendampingan hukum akan membawa dampak positif yang luas, tidak hanya bagi kelancaran proyek itu sendiri, tetapi juga bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan.

Model Ideal Collaborative Governance dalam Implementasi PSN di Kabupaten Musi Banyuasin

Pendekatan collaborative governance yang diterapkan dalam proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Musi Banyuasin telah menunjukkan adanya keberhasilan dalam beberapa aspek, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kelancarannya. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan model ideal collaborative governance yang dapat diadaptasi untuk proyek-proyek PSN di masa mendatang, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Model ini harus mampu mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi proyek, serta mengatasi hambatan yang muncul sepanjang pelaksanaan.

Sintesis Temuan Penelitian dan Model A.K.A (Aplikatif, Komprehensif, Adaptif) Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan PSN di Kabupaten Musi Banyuasin, dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan model collaborative governance yang ideal, diperlukan tiga komponen utama, yaitu Aplikatif, Komprehensif, dan Adaptif. Model ini, yang disebut Model A.K.A, dirancang untuk dapat diterapkan secara praktis (aplikatif), melibatkan semua pihak terkait dalam setiap tahap pelaksanaan proyek (komprehensif), serta mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terjadi di daerah (adaptif).

1. Aplikatif

Model A.K.A harus dapat diterapkan dalam praktik, dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik spesifik proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu, model ini memerlukan desain kelembagaan yang jelas, di mana setiap aktor memiliki peran yang terdefinisi dengan baik. Dalam proyek PSN, peran Kejaksaan Negeri sebagai pengawal hukum harus dilibatkan lebih intensif untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, model ini juga harus memperhatikan aspek pengawasan yang efektif, baik dalam hal pembebasan lahan, pengelolaan anggaran, maupun penyelesaian sengketa hukum yang mungkin timbul.

Agar model ini aplikatif, dibutuhkan sistem koordinasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, BBPJN, BUMN, serta masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus berperan sebagai fasilitator yang mampu menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak, sementara sektor swasta, terutama kontraktor, harus memastikan bahwa proyek dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam model ini untuk memastikan bahwa proyek PSN memberi manfaat langsung bagi mereka.

2. Komprehensif

Model A.K.A harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam proyek PSN secara menyeluruh. Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini mencakup koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antara aktor-aktor ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan proyek PSN.

Model ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keberhasilan collaborative governance terletak pada kemampuan untuk melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek tersebut, termasuk mereka yang terdampak langsung oleh proyek, seperti masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara mereka didengar, proyek PSN akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul.

Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri berperan sebagai mediator yang tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang mungkin timbul antara berbagai pihak. Kejaksaan juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa kebijakan

dan keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga mengakomodasi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, model kolaboratif yang komprehensif ini harus mampu menciptakan kesepahaman antara aktor yang terlibat dan memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan.

3. Adaptif

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan PSN di Kabupaten Musi Banyuasin adalah perubahan yang terjadi dalam dinamika sosial dan politik selama proyek berlangsung. Oleh karena itu, Model A.K.A harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Model ini tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan yang telah ada, tetapi juga harus mampu merespons dengan cepat setiap hambatan atau kendala yang muncul selama pelaksanaan proyek.

Dalam hal ini, adaptasi dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, termasuk aparat pemerintah daerah dan lembaga pengawasan seperti BPKP dan KPPIP. Keberhasilan model ini terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan situasi yang sering kali berubah, seperti hambatan sosial yang timbul akibat pembebasan lahan atau masalah hukum yang terkait dengan kontraktor. Oleh karena itu, kemampuan untuk merespons dan mencari solusi yang cepat dan tepat sangat penting untuk menjaga kelancaran proyek.

Selain itu, Kejaksaan Negeri juga harus memiliki fleksibilitas dalam menjalankan tugasnya. Pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan tidak boleh statis, tetapi harus dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam proyek. Misalnya, apabila muncul masalah hukum yang baru terkait dengan penggunaan anggaran atau masalah sosial yang mempengaruhi jalannya proyek, Kejaksaan harus dapat menyesuaikan strategi pendampingannya agar proyek dapat tetap berjalan tanpa hambatan yang berarti.

Penerapan Model A.K.A dalam Proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin

Penerapan Model A.K.A dalam proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak, memastikan bahwa setiap aktor yang terlibat memiliki peran yang jelas dan saling mendukung. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal.

Selain itu, model ini juga mengharuskan adanya pengawasan yang lebih ketat dari Kejaksaan Negeri untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kejaksaan harus aktif dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar, serta memberikan solusi terhadap masalah hukum yang mungkin timbul. Dalam hal ini, Kejaksaan harus memiliki peran yang lebih strategis dalam menjaga agar proyek PSN di Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

SIMPULAN

Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Melalui pengawasan hukum, pencegahan sengketa, dan pengelolaan anggaran, Kejaksaan Negeri memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan dan mengurangi potensi penyimpangan. Dampak positifnya termasuk percepatan pembebasan lahan, peningkatan transparansi anggaran, serta pengurangan potensi korupsi. Meskipun ada tantangan terkait kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi dengan lembaga lain, pendampingan hukum ini efektif dalam memperlancar proyek, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional (PSN). Melalui pengawasan terhadap pembebasan lahan, pengelolaan anggaran, dan penyelesaian sengketa hukum, Kejaksaan Negeri mampu mencegah masalah hukum yang menghambat proyek. Dampak positifnya termasuk percepatan pembebasan lahan, peningkatan transparansi anggaran, serta pengurangan potensi korupsi, yang berkontribusi pada kelancaran proyek dan akuntabilitas. Pendampingan hukum ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proyek dan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.

Model Ideal Collaborative Governance dalam Implementasi PSN di Kabupaten Musi Banyuasin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan proyek. Model A.K.A (Aplikatif, Komprehensif, Adaptif) dirancang untuk dapat diterapkan secara praktis, melibatkan semua pihak dalam setiap tahap proyek, serta mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang. Model ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara aktor terkait, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dan Kejaksaan Negeri sebagai pengawal hukum. Keterlibatan masyarakat juga krusial untuk memastikan proyek memberikan manfaat langsung bagi mereka. Selain itu, model ini harus fleksibel untuk mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan proyek dan responsif terhadap perubahan situasi yang terjadi.

REFERENSI

- Adawiyah, R., & Taupiqqurrahman, T. (2023). Problematika Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4037–4048.
- Apriyadi, H., & Triwibawanto, H. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL JALAN TOL GEDEBAGE-TASIKMALAYA-CILACAP. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(2), 119–131.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Ervianto, W. I. (2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional indonesia. *Simposium Ii Uniid 2017*, 2(1), 98–103.
- Faniyah, I., & Tanjung, A. (2022). Pendampingan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Pada Proyek Strategis Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum. *UNES Law Review*, 5(2), 251–260.
- Febriansah, Y., Akbar, B., & Suwanda, D. (2024). Implementasi Kebijakan Program Strategis Nasional pada PT. Waskita Karya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 544–557.
- Haja, L. (2020). Peran kejaksaan dalam pengamanan dan pendampingan hukum proyek strategis sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Jubaedah, E. (2011). Analisis Penerapan Model-Model Alternatif Penyediaan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 8(2), 1.
- Kelik Wardiono, S. H., Wardah Yuspin, S. H., MKn, P. D., Indah Maulani, S. H., & others. (2020). *Pencegahan Korupsi: Efektivitas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri di Eks Karesidenan Surakarta*. Muhammadiyah University Press.
- Kim, S. (2010). Collaborative governance in South Korea: Citizen participation in policy making and welfare service provision. *Asian Perspective*, 34(3), 165–190.
- Kline, P., & Moretti, E. (2014). People, places, and public policy: Some simple welfare economics of local economic development programs. *Annu. Rev. Econ.*, 6(1), 629–662.
- Martanti, Y. (2022). Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(4), 450–460.
- Mauludin, S. I., & Indrapradja, I. S. (2025). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 1002–1024.
- Mukti, R. A., & Efendi, D. (2020). *Kampung Hijau Gambiran: Praktik tata kelola lingkungan hidup berbasis collaborative governance*. Samudra Biru.
- Nobel, A., & Larasati, N. P. (2017). Inovasi pembiayaan tanah untuk proyek jalan tol yang termasuk dalam proyek strategis nasional dengan mempergunakan mekanisme dana talangan. *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, 3(2).

- Putri, A. M. (2024). Strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan: analisis bantuan luar negeri Jepang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, 1*(2), 85–102.
- Ramadhani, S. A. N., Malika, K. C., Ramadhanti, Y. A. P., & Hafina, A. O. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 3*(01).
- Santosa, M. A., Suharto, S., & Hariyana, T. D. (2022). Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Proyek Strategis Nasional (Study Putusan Perkara Nomor 61/Pdt. G/2016/PN. Gsk). *Jurnal Fundamental Justice, 143–164*.
- SUSANTO, D., NPM, S. H., & others. (2020). Peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (Tp4d) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). *Jurnal Nestor Magister Hukum, 4*(4), 210365.
- Wahyu, M. B. (2018). Pendekatan Manajemen Program dengan Menggunakan Maeutic Machine dalam Percepatan Pencapaian Proyek Strategis Nasional RPJMN 2015-2019. *Metris: Jurnal Sains Dan Teknologi, 19*(01), 65–70.